

TATANAN GLOBAL PADA PEMBANGUNAN DAN EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL SELAMA DAN PASCA PANDEMI COVID-19

Hino Samuel Jose¹, Indah Pratiwi Eri Putri²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

¹abrahamhinosamueljose@upnvj.ac.id, ²indahprt看ip@gmail.com

Abstract

Covid-19 pandemic has done tremendous effects to global governance either in the aspects of economy, politics, health, diplomacy, and policy making patterns by each country in responding towards the pandemic. International relations became the main perspective that was assessed by this article by considering the impacts of Covid-19 pandemic on the international economy and political aspects. This article elaborates the global situation on the status quo of the Covid-19 pandemic to explain the opportunities, challenges, and changes those related with the IR context and the projections of the IR dynamics on the post-pandemic era after Covid-19. This article elaborated those contexts by relating with relevant IR theories such as liberalism, neorealism, regionalism, and international politics and economy theories. It can be concluded that there are 3 extracted substantial points from this article which are: There are tremendous disruption in regards of international cooperation within the global governance; changes in diplomacy and international politics that made protectionism proliferates against integration and policymaking within the global governance architecture either during pandemic or post-pandemic; shifting within the international system where regional role became prominent; and non-traditional security agenda tend to be emphasized because of the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Cooperation, pandemic, policy, human security, region*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang muncul sejak November 2019 dari Wuhan, Tiongkok menimbulkan dampak begitu besar pada tatanan global baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, dan kemanusiaan. Munculnya wabah virus SARS-Coronavirus-2 ini yang kemudian memperoleh status darurat pada Januari 2020 hingga pandemi global pada 2020 menjadi salah satu penyakit yang menempati status tertinggi setelah 2 dekade terakhir. Covid-19 telah memakan korban sebesar 7 juta orang dari seluruh dunia. Covid-19 juga telah memberikan dampak yang sangat substansial sehingga membuat setiap negara mengerahkan usaha-usaha yang maksimal dalam penanganan wabah ini.

Wabah Covid-19 memang bukan pandemi pertama yang dihadapi dunia. Namun krisis yang diakibatkan lebih parah dibanding MERS, SARS, dan flu burung. Perlu diketahui bahwa globalisasi zaman kini mempercepat penyebaran Covid-19 dan juga mempercepat penanganan dan pencegahan. Munculnya pandemi ini juga membuat teknologi dan dinamika interaksi masyarakat internasional pada 20 tahun yang lalu dan pada saat ini sangatlah berbeda dikarenakan perkembangan teknologi yang masif, terstruktur, dan progresif. Namun demikian dibalik kemajuan yang dibawa oleh Covid-19, korban yang berjatuhan mendorong para aktor baik negara maupun non-negara berubah secara *societal* maupun *behavioural*. Kondisi ini memaksa berbagai negara di belahan dunia untuk menerapkan kebijakan pembatasan massa dan keputusan politik seperti: *social distancing*, *physical distancing*, *lockdown*, dan penutupan perbatasan seperti penghentian pemberian visa untuk warga negara asing. Penutupan rute penerbangan dan pembatasan terhadap aktivitas keluar masuk perbatasan untuk warga negara asing telah dilakukan oleh berbagai negara, yang dimana hal ini diikuti juga dengan melakukan repatriasi terhadap warga negaranya yang terjebak di negara lain melalui penerbangan darurat maupun memfasilitasi kepulangan untuk warga negaranya sendiri. Penutupan berbagai fasilitas umum, pembatasan operasional perkantoran, dan kebijakan pengontrolan virus lainnya seperti pembatasan aktivitas masyarakat dan penutupan transportasi massal membuat ekonomi lesu. Dampak ekonomi tidak hanya pada level domestik, namun juga pada level global seperti penurunan valuasi perdagangan dunia hingga 32% dan penurunan valuasi pasar saham global sebanyak 10%. Hal ini diiringi pula dengan naiknya angka kemiskinan dan penurunan performa perusahaan yang membuat jutaan orang di seluruh dunia harus menerima nasib di-PHK oleh perusahaannya akibat ketidakmampuan perusahaan untuk menutup biaya operasional di tengah pandemi yang mengurangi pemasukan (OECD, 2020).

Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa agenda dan isu-isu keamanan non-tradisional menjadi salah satu hal yang harus diprioritaskan dalam tatanan global. Hal ini terlihat dari dampak yang dibawa oleh pandemi Covid-19 itu sendiri seperti dalam hal institusionalisasi rezim internasional baik dari level bilateral, kawasan, multilateral, hingga global yang mengedepankan kerja sama luar negeri untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang diperoleh dari kerja sama dengan negara lain, *transfer of knowledge* melalui tenaga medis, bantuan suplai obat-obatan, dan kerja sama ekonomi untuk mendukung dan memberi stimulus agar kondisi ekonomi yang jatuh terpuruk dapat bangkit kembali. WHO menekankan bahwasanya pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang memerlukan implementasi penuh dari peraturan kesehatan internasional (*International Health Regulation/IHR*) sebagai rezim kesehatan internasional. Besaran usaha dalam merespons pandemi global yang berskala besar dengan persebaran yang masif dan berbahaya membuat negara dituntut untuk bersiap dalam merespons pandemi dengan beberapa skenario seperti: Persiapan infrastruktur dan suprastruktur kesehatan nasional; persiapan penanganan penjagaan pintu masuk negara dan pembatasan untuk mencegah kasus infeksi dari migrasi manusia dari luar negeri (kasus impor); perencanaan untuk program

sanitasi dan desinfeksi influenza; dan *risk-assessment* dari kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam merespons dan melakukan penilaian dalam efektivitas respons untuk penanganan masalah kesehatan selama pandemi global sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh badan kesehatan dunia atau WHO (WHO, 2020).

Perspektif hubungan internasional memandang bahwa Covid-19 menyebabkan krisis global. Pandemi Covid-19 memberikan suatu pemahaman baru di mana aktor-aktor dalam sistem internasional bekerja sama dalam penanganan krisis global yang muncul dalam level yang tak terduga. Namun dapat dipastikan apabila teori realis berhasil menjelaskan bahwa sistem internasional bersifat anarki maka dapat dipastikan bahwa muncul satu pertanyaan mengenai legitimasi label sistem internasional yang anarki tersebut yang dapat dipandang baik dalam kerja sama yang dilakukan di tengah pandemi maupun persaingan setiap negara dalam meningkatkan kemampuan mereka menghadapi pandemi Covid-19. Dengan situasi demikian, maka redefinisi HI terjadi sebagai bentuk pengujian terhadap relevansi teori dan konsep yang menjelaskan dinamika sistem internasional terutama dalam bidang kerja sama dan persaingan yang memiliki karakter khususnya di dalam HI. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwasanya komunitas internasional memiliki *common ground* dalam penanganan pandemi ini seperti: Peningkatan kualitas dan kuantitas personil medis untuk penanganan kasus dalam fasilitas kesehatan darurat berskala nasional; melakukan implementasi kebijakan yang berlandaskan pada pelacakan kasus-kasus dan kontak-kontak yang dilakukan secara komprehensif; melakukan perubahan dan pengalihfungsian baik anggaran maupun infrastruktur untuk mengakomodasi kepentingan kesehatan darurat domestik di setiap negara; perencanaan untuk kebijakan pembatasan pergerakan dan mobilisasi massal; serta penyesuaian kebijakan dukungan untuk meminimalisir kerugian dari kebijakan pembatasan yang berdampak pada bidang perekonomian sehingga menjadi tidak produktif akibat persebaran virus yang begitu masif (Djalante, et al., 2020).

Dalam tingkat global, usaha kerja sama dan respons yang ada berfokus untuk mengurangi dampak besar melalui usaha-usaha untuk memperlambat laju persebaran virus, serta untuk mengurangi kelelahan dari infrastruktur dan sumber daya medis yang terbatas dalam lonjakan kasus infeksi yang begitu besar dengan kontrol dan pengawasan ketat. Namun usaha ini terhambat akan kondisi ekonomi masyarakat yang beragam serta untuk menghindari efek domino. Pandemi Covid-19 membuat setiap negara harus melakukan hal-hal apapun yang dinilai perlu untuk penanganan virus ini, dan pandemi Covid-19 telah mempengaruhi peta politik dan pola kerja sama antar-negara di mana dalam hal ini dinilai bahwa dunia terbelah dalam mengambil sikap terhadap persebaran pandemi global yaitu negara-negara yang mengambil pendekatan pesimistis maupun negara-negara yang percaya dalam semangat multilateralisme dalam memenuhi serta mengambil tindakan kolektif dalam tatanan ekonomi maupun politik global. Politik global yang dimaksud merupakan hasil langsung interdependensi di antara aktor-aktor globalisasi yang didukung kemajuan teknologi serta mendorong *inter-connectivity* lintas benua. Artikel ini membahas lebih lanjut bagaimana tatanan politik

ekonomi internasional berubah mengikuti perkembangan Covid-19 yang merubah perilaku para aktor. Adapun penelitian ini juga membahas bagaimana agenda non-tradisional seperti keamanan manusia, politik ekonomi internasional, dan diplomasi pasca pandemi dilakukan untuk memulihkan status quo global.

Liberalisme dalam Hubungan Internasional

Liberalisme dapat dipahami sebagai suatu prinsip dan teori yang digambarkan dengan beberapa asumsi dasar fundamental yang ditekankan pada nilai kebebasan seperti kebebasan individu, partisipasi politik yang meningkat, hak-hak dan ruang pribadi yang dijamin, dan kesetaraan kesempatan untuk semua individu. Liberalisme menekankan pula asumsi bahwa kebebasan aktor dalam hal ini adalah konteks negara menjelaskan fitur dari demokrasi modern yang digunakan dalam melaksanakan interaksi sistem internasionalnya. Liberalisme yang ideal sendiri secara filosofis memiliki empat poin yang menegaskan betul implementasi dari liberalisme itu sendiri: Pertama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers; kedua, kekuasaan legislatif yang ada mampu menjalankan fungsi perwakilan mereka sebagai representasi masyarakat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun untuk mempertahankan hak-hak fundamental sipil, yaitu di mana dalam HI dapat dilihat bahwa liberalisme membuat negara sebagai aktor yang tidak tunduk pada otoritas di luar negaranya atau otoritas internalnya yang memiliki hak prerogatif; ketiga, liberalisme memiliki asumsi bahwasanya filosofi ekonomi yang ada harus mengakui hak kepemilikan pribadi termasuk hak untuk menciptakan atau memproduksi sesuatu, di mana ini dapat dipahami sebagai hal yang dapat dijustifikasi untuk dimiliki secara individu dan bukan secara bersama; dan keempat, pengambilan keputusan dalam kebijakan perekonomian yang ada dibentuk oleh permintaan dan penawaran dari pasar baik dalam level domestik maupun luar negeri yang bebas dari birokrasi yang ketat dan mengikat (Badie, Berg-Schlosser, & Morlino, 2011).

Salah satu aspek dasar konsep liberalisme itu sendiri adalah *civil liberty* yang menjelaskan perilaku aktor dalam studi HI. Seperti apa yang telah didefinisikan Kant bahwa liberalisme mendeskripsikan negara sebagai suatu entitas dalam sistem internasional yang mengedepankan hubungan antar negara berdasarkan penggunaan dari institusi internasional, interdependensi ekonomi, dan kerja sama yang kuat dalam mengatasi dan mencegah konflik yang berpotensi disebabkan oleh penggunaan kekuatan oleh aktor yang dipandang mengancam (Meiser, 2018). Kant melalui bukunya yang berjudul *Perpetual Peace* juga menjelaskan mengenai filosofi yaitu adanya suatu konsep *mutual trust* dan perdamaian dapat dicapai ketika tidak adanya pelanggaran kedaulatan oleh aktor eksternal suatu negara melalui cara apapun termasuk melalui pengembangan kerja sama ekonomi. Pada bagian lain dari bukunya itu, Kant turut menekankan mengenai “*Standing Armies (miles perpetuus) Shall in Time Be Totally Abolished*” untuk menjunjung tinggi kebebasan serta justifikasi dari liberalisme (Kant, 1795).

John Locke juga mempunyai asumsi yang memiliki irisan dengan seperti apa yang telah dikemukakan Kant mengenai prinsip dari liberalisme itu sendiri. Locke menekankan pada tiga prinsip dasar dalam liberalisme yaitu: Kepemilikan properti atau hak pribadi yang di mana Locke menekankan pada relasi *good governance* dan *liberty* yang di mana hal ini merupakan *nature* bahkan sebelum negara itu muncul yang menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban serta pentingnya asumsi bahwa manusia tidak boleh menghilangkan hak orang lain bahkan sebelum hukum itu ada; kedua, Locke juga mengemukakan prinsip pembatasan pemerintahan (*limited government*) untuk mencegah munculnya tindakan otoriter atau pendirian tirani kekuasaan di mana hukum dan kekuasaan itu harus ada untuk menjamin kebebasan namun tidak mengatur kebebasan tersebut dengan tindakan-tindakan yang bersifat koersif serta bermakna, di mana keamanan pada dasarnya adalah sebuah perpanjangan logis dari peradaban serta hukum pada hakikatnya; dan ketiga, adalah prinsip di mana Locke membagi pemerintahan suatu negara menjadi tiga bagian yaitu syarat, *charity*, dan demokrasi yang di mana pemerintah sebagai otoritas hadir untuk menjamin hak rakyatnya dengan demokrasi dan perlindungan dari negara (Locke, 1988). Prinsip dasar dari liberalisme Locke ini senada dengan prinsip liberalisme klasik lainnya di mana ada tiga kebebasan yang dijunjung tinggi. Pertama, kebebasan dari koersi yang bersifat privat (*private property*). Kedua, kebebasan dari pemaksaan dari koersi publik (*limited government*). Ketiga, kebijakan serta pengaturan dari negara mengenai ketentuan *public goods* atau barang umum (*limited state welfare*).

Dalam konteks HI itu sendiri liberalisme berdiri sebagai kerangka teori ilmu pengetahuan yang menjelaskan perilaku negara sebagai aktor dalam HI dan bukanlah sebagai kerangka teori yang menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh negara dalam berinteraksi di dalam sistem internasional yang ada. Teori liberal ini dijelaskan serta diperdebatkan sebagai teori yang hadir untuk menjadi teori yang mampu menjelaskan ide normatif dari kerja sama dan perdamaian dan bukan untuk generalisasi sifat dan karakter manusia yang mana hal ini membuat teori liberalisme mendapatkan label sebagai idealis, legalis, moralis, reduksionis, maupun sebuah utopia (Moravcsik, 1992). Liberalisme juga memiliki lima fitur yang dinilai sebagai suatu variabel khas dan khusus seperti: Mampu menjelaskan mengenai pola interaksi antar negara melalui perjanjian untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah hegemoni dan disrupsi global; berhasil melakukan penetrasi terhadap *reciprocal hegemony*; integrasi aktor-aktor negara baik *great power* maupun negara lain yang *non-great power*; liberalisasi dan keterbukaan ekonomi; dan pentingnya *civic identity* sebagai aspek fundamental dari liberalisme itu sendiri (Jahn, 2018).

Liberalisme memiliki tiga keunggulan dibanding dengan realisme untuk menjelaskan pola perilaku negara dalam sistem internasional: Pertama, liberalisme mampu beradaptasi dan menawarkan relevansi dan sifat koherensi dalam menjelaskan perubahan historis dari sistem internasional itu sendiri baik dalam konteks perubahan dalam perdamaian maupun ekonomi politik internasional; (2) Liberalisme menjelaskan lebih kepada aspek kerja sama internasional dalam pencegahan konflik antar aktor pada sistem internasional; (3)

Liberalisme menjelaskan bagaimana aktor menetapkan *bargaining power* – liberalisme mengatasi kegagalan realisme dalam menjelaskan *power* pada konteks liberal ketimbang pada isu *high politics*. dan (4) liberalisme mampu menyatukan faktor pertimbangan dari level sistemik maupun domestik dalam satu kerangka yang menunjukkan bahwa liberalisme bukan hanya sebagai *unit-level theory* yang menggunakan asumsi bahwa politik domestik tidak dapat diabaikan dan harus diutamakan di atas kebijakan luar negeri. Liberalisme memiliki dimensi sistemik yang mampu juga menjelaskan representasi dari kepentingan domestik yang menghubungkannya dengan politik internasional serta berdiri sebagai suatu kerangka teori yang mampu menjelaskan HI dengan *comparative politics* (Moravcsik, 1992).

Teori Tataan Ekonomi Global dalam Ekonomi Politik Internasional (Global Economic Governance)

Stabilitas ekonomi dan finansial serta krisis yang mewarnainya seperti krisis ekonomi global 2008 telah memberikan dampak serta menimbulkan *shifting* dari aktor-aktor untuk bangkit dan melakukan *recovery* terhadap kondisi perekonomian yang luluh lantak akibat krisis. Dapat didefinisikan bahwa tatanan ekonomi global sendiri adalah sebuah interdependensi ekonomi global yang ditujukan untuk setiap aktor dalam sistem internasional (aktor transnasional) untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara bersama dan kolektif di bawah suatu tatanan yang disepakati secara kolektif. Tatanan ekonomi global yang adapun tentu dapat dipahami sebagai salah satu wujud dari liberalisasi ekonomi yang di mana negara sebagai aktor berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka yang tidak bisa dipenuhi secara domestik melalui kerja sama dan mekanisme yang ada dalam suatu rezim internasional. Meskipun para ahli yang berorientasikan realisme seperti Waltz percaya bahwa tatanan yang ada tidak boleh melebihi level negara, pada nyatanya tatanan ekonomi global atau *global economic governance* menjadi suatu hal yang layak diperdebatkan dalam rumpun akademik. Namun, kondisi dinamika ekonomi dunia serta munculnya WTO menjadi salah satu bukti bahwasanya perkembangan ekonomi global mulai berjalan selaras dengan gagasan bahwasanya ekonomi global ada di dalam suatu tatanan yang semacam pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan integrasi ekonomi di tengah era globalisasi yang di mana aktor-aktor negara mengambil tindakan serta kebijakan kolektif dalam rezim internasional. Para negara sebagai agen itu sendiri melakukan pengambilan kebijakan ekonomi secara kolektif yang berangkat dari asumsi diplomasi ekonomi internasional untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam tingkat global dan dalam hal ini para negara memiliki *privilege* untuk membawa kepentingan ekonomi domestiknya ke dalam organisasi/rezim internasional. Asumsi ini menjadi asumsi normatif dasar dari tatanan ekonomi global itu sendiri serta dapat dipahami bahwasanya tatanan ekonomi global dibutuhkan untuk mencapai *balance of power* dalam semangat multilateralisme (Higgot, 2012).

Krisis ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi, bencana, perang, dan sebagainya memberikan suatu pemahaman di mana salah satu karakteristik

utama dari krisis ekonomi global adalah pergeseran, perubahan, maupun penurunan dari kapitalisasi pasar dan arus ekonomi secara global. Krisis ini memberikan suatu dampak langsung yang membuat setiap negara yang terdampak harus melakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan moneter yang terkadang berisiko menyebabkan inflasi, utang luar negeri meningkat, dan pelemahan mata uang domestik terhadap mata uang asing maupun sebaliknya. Tatanan ekonomi global memberi jawaban dengan melakukan tindakan kolektif untuk *recovery* dari krisis ekonomi baik dalam era pasca pandemi, *post-war*, *post-disaster*, dan sebagainya (Gallagher, 2012). Tatanan ekonomi global sendiri merupakan suatu hal yang sering disebut baik dalam forum internasional maupun para akademisi dalam menjelaskan dan memahami bagaimana negara-negara di dunia menghadapi krisis dengan penyelesaian yang bersifat kolektif secara multilateral. Umumnya, tatanan ekonomi global dipahami secara fundamental dengan adanya suatu institusionalisasi kerja sama antar pemerintahan (*inter-governmental*) yang menggunakan usaha-usaha dan mekanisme yang luar biasa atau bersifat supranasional seperti IMF. Namun, selain itu masih ada hal yang perlu dipahami lebih dalam di mana tatanan itu sendiri (*governance*) bertindak sebagai suatu kuasa yang memiliki otoritas untuk mengatur layaknya pemerintahan dengan struktur dan fungsi untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang lebih mengikat kepada aktor-aktor yang tergabung di dalamnya dengan mekanisme yang telah disetujui bersama (Frieden, 2012). Tindakan-tindakan yang dilakukan tentunya mengarah kepada harmonisasi kebijakan makro ekonomi, liberalisasi perdagangan, integrasi moneter (seperti integrasi ekonomi pada kawasan Uni Eropa), mekanisme bantuan pendanaan maupun bantuan bersifat *policy guidance* dalam bidang perekonomian, dan kebijakan kontrol nilai tukar mata uang asing tertentu. Tentunya negara diwajibkan untuk melakukan intervensi yang diperlukan untuk menjaga agar nilai yang diharapkan tetap stabil dalam harmonisasi kebijakan moneter maupun kebijakan perdagangan antar negara dalam tatanan ekonomi global yang mulai bergerak menuju penekanan regionalisme (kawasan) sebagai tumpu kerja sama setiap negara dalam liberalisasi ekonominya.

Bentuk-bentuk tatanan ekonomi global itu sendiri secara garis besar bersandar pada dua level analisis yaitu level regionalisme maupun level analisis multilateralisme. Regionalisme itu sendiri memiliki salah satu definisi yang disetujui oleh WTO dalam konteks tatanan ekonomi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan terkait untuk melakukan liberalisasi maupun fasilitasi dari perdagangan pada tingkat kawasan melalui perjanjian area perdagangan kawasan maupun dalam bentuk *custom union*. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu seperangkat tindakan yang berurutan untuk memperdalam integrasi ekonomi dari level *free trade agreement* hingga ke integrasi yang lebih besar seperti *economic union* yang di mana integrasi tersebut memerlukan tindakan seperti integrasi mikroekonomi dan makroekonomi serta dilakukan dengan tindakan supranasional yang dibutuhkan untuk mendorong integrasi tersebut (Gavin & Langenhove, 2003). Hal ini dikembangkan secara teoritik dengan apa yang dikemukakan oleh Breslin dan Higgot di mana regionalisasi merupakan suatu proses yang didorong oleh arus perdagangan di pasar dan

investasi, relaksasi tarif ekspor impor, dan memiliki makna bahwa regionalisme adalah suatu bentuk inisiatif kerja sama atau dialog antar pemerintahan berdasarkan perjanjian oleh aktor negara dalam satu kawasan (Breslin & Higgot, 2000). Tatanan perekonomian global secara historis sudah mengalami tiga kali evolusi semenjak era standar emas (*gold standard*) pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, periode kurs tetap (1945-1973), dan periode post-bretton woods (1973-sekarang). Sistem moneter internasional sendiri yang berubah untuk tiga kali semenjak IMF resmi didirikan setelah pertemuan Bretton Woods memiliki pengertian sebagai suatu seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang negara ditukarkan dengan mata uang lain dengan nilai tukar yang ditetapkan (Shapiro, 1992).

METODE PENULISAN

Artikel ini ditulis melalui *document-based* dan *internet-based research* yang berdasar pada studi pustaka dari penelitian dan data kualitatif yang relevan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dalam menjelaskan sub pembahasan dalam konteks permasalahan yang ada dalam hubungan internasional. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan, menggambarkan, menyelidiki, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh atau faktor sosial yang tidak dapat digambarkan, dijelaskan, ataupun diukur melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan berbagai data dari berita, buku, web resmi, jurnal, laporan resmi, artikel, skripsi, dan sumber internet. Dari berbagai sumber diatas, diharapkan dapat membantu penulis melakukan penelitian mengenai langkah-langkah serta analisa terhadap isu artikel ini. Tinjauan literatur pada artikel ini menggunakan analisis kualitatif dalam menjelaskan isu yang dibahas melalui metode *document-based* dan *internet-based* berdasarkan studi kontemporer yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja sama Internasional saat Pandemi – Post Pandemi: Global Health Diplomacy

Diplomasi kesehatan global atau *global health diplomacy* memiliki kerangka teori yang dianalogikan sebagai suatu piramida yang menjelaskan tiga tingkatan level analisis dengan menegaskan pada kohesivitas dan kesinambungan aksi dan reaksi dari para pemangku kepentingan yang terdiri dari: *Core health diplomacy* atau diplomasi kesehatan unsur inti yang menekankan pada peranan interaksi antara aktor pemerintahan suatu negara dengan menggunakan perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan bilateral maupun multilateral di mana *core health diplomacy* sebagai tingkatan memiliki sifat lebih condong kepada *policy making* ketimbang praktik dari diplomasi kesehatan itu sendiri; *multistakeholders diplomacy* atau diplomasi kesehatan yang melibatkan banyak aktor dalam hal ini tidak hanya aktor negara tetapi juga melibatkan aktor non-negara serta

menekankan pada pentingnya kerja sama sebagai partner dalam mekanisme institusi yang intensif baik dari badan pemerintahan maupun badan multilateral; dan *informal health diplomacy* atau diplomasi kesehatan informal yang melibatkan interaksi antara para aktor baik dalam sektor kesehatan publik maupun sektor kesehatan lokal yang menggunakan kesepakatan untuk melakukan riset bersama dalam bidang pengembangan medis, pembiayaan maupun bantuan, *transfer of knowledge* dan *transfer of technology*, serta pelibatan badan kemanusiaan dalam pelaksanaan diplomasi kesehatan informal tersebut. Dalam pelibatannya, perwakilan dari badan multilateral, *non-state actor*, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan penelitian, serta masyarakat publik menjadi aktor-aktor dalam operasionalisasi teori diplomasi kesehatan informal (Katz, 2011).

Salah satu bentuk umum dari diplomasi kesehatan global dimanifestasikan dalam kerja sama penyediaan alat kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis melalui *transfer of knowledge*, peningkatan bantuan obat-obat, dan kerja sama integrasi sistem kesehatan lintas batas antar negara yang tentunya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Integrasi sistem kesehatan antar negara, dan negosiasi peraturan maupun instrumen hukum internasional mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan tentu juga menjadi salah satu fokus penting untuk memperjelas yurisdiksi serta *provisions* dari kerja sama kesehatan yang dilakukan untuk menjaga hubungan *mutual trust* dan *strategic partnership* selama pandemi demi dapat menangani virus dan pembagian informasi (*information sharing*) yang intensif. Pembagian informasi penting dalam pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan dua negara maupun lebih (Volodzk, 2016).

Selama masa pandemi, diplomasi kesehatan sejalan dengan perkembangan globalisasi di mana seluruh hal yang ada baik ekonomi, politik, sosial-budaya, maupun keamanan baik dari segi informasi maupun segi arus perekonomian dunia semakin *borderless* dan menembus batas negara sebagai salah satu kebijakan penyesuaian yang dikeluarkan oleh berbagai negara anggota WTO. Negara-negara anggota WTO menghapuskan pajak untuk alat kesehatan dan meningkatkan kapitalisasi maupun valuasi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bergerak dalam bidang medis untuk mendukung transparansi dan terbukanya arus perdagangan global untuk pemenuhan kebutuhan medis negara yang harus mengandalkan impor demi menekan jumlah kasus positif. Hal ini turut mencegah negara mereka terkena efek negatif dari pembatasan perbatasan. Dalam segi positif, hal ini untuk kontribusi negara dalam penyediaan akses yang lebih mudah dalam menekan laju penyebaran pandemi. Tidak dapat dilupakan bahwa globalisasi jugalah yang membuat migrasi manusia lintas batas. Penekanan pandemi tidak sepenuhnya dapat dicegah dengan hanya sekadar *screening* maupun *testing* di pintu-pintu setiap negara (Kickbush & Erk, 2009).

Covid-19 telah memakan korban sebanyak 7 juta orang dari seluruh dunia mengakibatkan disrupsi yang sangat substansial terhadap berbagai dimensi mulai dari kesehatan, pemerintahan, kemanusiaan, kerja sama regional hingga

multilateral, dan ekonomi sosial. Dalam mengatasi Covid-19, setiap negara mulai melangsungkan kerja sama luar negeri mereka dengan memprioritaskan diplomasi kesehatan mulai dari pengiriman bantuan alat kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, dan kerja sama ekonomi untuk memberi stimulus agar perekonomian yang terpuruk bisa bangkit. Negara-negara di seluruh dunia semenjak Januari 2020 telah mulai mengimplementasikan rekomendasi kebijakan dan *guidelines* yang telah ditetapkan WHO untuk mendukung penanganan wabah Covid-19 yang semakin meluas, tidak hanya di Asia namun sudah menjangkau Eropa bahkan Amerika. Namun, berbagai pertimbangan perlu diperhitungkan oleh negara ketika akan mengimplementasikan rekomendasi yang ditetapkan WHO dikarenakan rekomendasi dan standar seperti *social distancing* maupun *physical distancing* yang akan membatasi kegiatan massal dan mengurangi interaksi antar manusia tentu akan berdampak langsung pada kesinambungan roda perekonomian. Negara dihadapkan dengan dilema untuk membatasi pergerakan warga negara mereka sementara di sisi lain juga dituntut untuk menjaga agar kondisi ekonomi tetap stabil. Walaupun begitu, dapat dipahami bahwa *economic fallout* adalah dampak dari pandemi Covid-19 yang tidak dapat dihindari dikarenakan bersifat substansial dan masif pada roda perekonomian. Sehingga dalam hal ini negara-negara di seluruh dunia yang terkena dampak Covid-19 cenderung untuk mengimplementasikan pembatasan massal seperti *social & physical distancing* namun dengan periode waktu yang cukup pesat dikarenakan apabila terlalu lama menutup negaranya maka akan ada beberapa kemungkinan seperti warga negara yang tidak siap untuk menjalani pola hidup *new normal* pada periode pasca pandemi dan perekonomian yang tidak bisa kembali seperti semula. Ditambah dengan fakta bahwa produktivitas dan valuasi pasar akan menurun lebih drastis, membuat daya beli konsumen maupun perputaran *capital gain* terhambat. Dalam hal ini, setiap negara mulai membawa agenda dan masalah domestik mereka untuk diselesaikan dengan cara diplomasi di tengah pandemi bersamaan dengan implementasi regulasi kesehatan internasional serta kerja sama *capacity building* dalam bidang medis untuk penguatan sumber daya manusia dalam melakukan manajemen risiko pada pandemi. Dari narasi diatas, dapat disimpulkan ada dua urgensi di mana kesehatan harus diutamakan namun juga perekonomian tidak boleh dilupakan. Dapat dipahami bahwa dilema seperti ini terjadi di semua negara yang mengakibatkan perbedaan pendirian dari setiap negara mengenai perspektif akan *lockdown* maupun pembatasan berskala besar seperti apa yang telah direkomendasikan WHO. Kawasan seperti ASEAN dan Uni Eropa meningkatkan kerja sama bidang kesehatan mereka dalam masalah Covid-19, namun dapat dilihat bahwasanya kedua kawasan ini memiliki karakteristik diplomasi dan pola kerja sama yang berbeda dikarenakan prinsip dari institusionalisasi rezim. Kawasan ini memiliki prinsip fundamental yang berbeda di mana ASEAN cenderung non-intervensi serta kerja sama berdasarkan *mutual trust* dan *capacity building* sedangkan Uni Eropa mengutamakan harmonisasi integrasi kebijakan seperti kerangka kerja dan strategi yang dilaksanakan secara kolektif.

Apabila meninjau secara historis dan periodik tentang isu pandemi Covid-19, *global health diplomacy* itu sendiri dimulai ketika WHO mulai menerbitkan

status pandemi Covid-19 sebagai *global health emergency* dan delegasi dari setiap negara untuk beberapa organisasi internasional seperti PBB, WTO, WHO, dan organisasi kawan mulai memformulasikan strategi dan rencana-rencana untuk diadopsi sebagai arah kebijakan selama pandemi. *Benchmark* tersebut dapat dimulai ketika *emergency committee* WHO resmi menyatakan bahwa peraturan kesehatan internasional atau IHR (*international health regulation*) dalam bentuk mekanisme PHEIC (*Public Health Emergencies of International Concern*) resmi diimplementasikan sebagai bentuk legislasi kepatuhan dari setiap negara anggota dalam penanganan Covid-19 yang membutuhkan presisi, *resilience*, dan aksi yang responsif tanpa penundaan. Namun, ada satu hal yang dapat ditarik ketika negara anggota gagal untuk mengimplementasikan arahan WHO tepat waktu dikarenakan ketakutan dari para aktor pemerintahan untuk kehilangan sumber devisa negara dan menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat yang terwujud dalam bentuk *panic buying*. Diskriminasi ras maupun golongan tertentu dan beredarnya informasi kesehatan yang dilebih-lebihkan atau palsu turut dapat berpengaruh kepada psikologi masyarakat di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian. Hal ini tentu dapat berpengaruh dalam proses penanganan wabah dalam *early stage* sehingga membuat negara-negara dan para pemimpin di OI seperti WHO mengalami dilema dalam penegakan mekanisme darurat di tengah integrasi ekonomi dan globalisasi yang begitu pesat yang meningkatkan migrasi manusia antar negara dalam level yang cukup masif dan persebarannya yang dinamis (Busby, 2020).

Pada level analisis regional, diplomasi kesehatan dilakukan oleh aktor negara yang terafiliasi pada rezim kawasan tersebut, dalam hal ini adalah ASEAN dan Uni Eropa. Kedua kawasan tersebut memiliki pendekatan dan rezim yang berbeda dalam melaksanakan diplomasi kesehatan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pertama, ASEAN adalah satu-satunya rezim kawasan di Asia Tenggara yang memiliki 10 negara sebagai *member states* yang melakukan kerja sama aktif baik dalam menghadapi pandemi maupun dalam kerja sama ekonomi politik darurat yang dilakukan dalam menyesuaikan kawasan agar tetap *resilient* di tengah pandemi Covid-19. ASEAN berkontribusi aktif dalam penanganan pandemi dengan melakukan berbagai inisiatif kawasan baik dalam pembentukan pertemuan-pertemuan kelompok kerja kementerian-kementerian terkait dari negara-negara ASEAN. Pertemuan gabungan maupun pertemuan darurat antara kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan mitra-mitra antar kawasan ASEAN itu sendiri seperti pertemuan gabungan kementerian-kementerian maupun kepala pemerintahan negara-negara anggota ASEAN+3 untuk membahas respons kolektif serta harmonisasi kebijakan dari penanganan pandemi, baik dari skala domestik, bilateral, intra-kawasan, maupun antar kawasan.

Salah satu pertemuan di mana pertemuan darurat daring setingkat menteri kesehatan negara anggota ASEAN adalah pada 30 April 2020. Pertemuan antar menteri kesehatan negara anggota ASEAN tersebut bertujuan untuk menyusun komitmen kawasan melalui komunique bersama. Pertemuan tersebut menyatakan bahwasanya kerja sama kawasan ASEAN dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mengadopsi 10 solusi substansial sebagai dasar stipulasi pemerintahan

negara ASEAN dalam penanganan Covid-19 yang berisi: Penekanan akan pertukaran informasi yang transparan serta presisi mengenai implementasi terbaik dan kebijakan yang inklusif dalam respons kesiagaan Covid-19 berpaku pada standar rekomendasi WHO; pernyataan akan pentingnya alat kesehatan dan alat pelindung diri serta menjamin dukungan suplai alat-alat medis kepada negara-negara ASEAN dalam melawan pandemi Covid-19 dengan melakukan berbagai terobosan kerja sama penelitian dan praktik manajemen klinikal, riset pengetahuan, dan dukungan terhadap berkembangnya infrastruktur serta sistem laboratorium ASEAN demi mencari obat maupun mempelajari mutasi virus Covid-19; memastikan ketersediaan persediaan daripada negara-negara ASEAN terhadap obat-obatan dan anti-virus yang dapat dipakai untuk melawan Covid-19 maupun dengan menekan urgensi akan penelitian untuk vaksin Covid-19; menciptakan media yang dinamakan *Covid-19 ASEAN Response Funds* untuk membantu berjalannya solusi dan kemitraan antar negara ASEAN dengan bantuan partner dari luar ASEAN; penekanan akan pentingnya kerja sama antara ASEAN dengan Amerika Serikat untuk bantuan finansial antar kawasan sebesar 35 juta dollar AS untuk membantu negara anggota ASEAN yang membutuhkan dana dalam mengimplementasikan ataupun untuk memberi stimulus bagi ekonomi kawasan yang melemah; dan para menteri juga sepakat untuk memberikan masukan akan pelaksanaan *universal health coverage* sebagai sistem asuransi maupun jaminan sosial. Hal tersebut untuk mendukung kesinambungan berjalannya fasilitas medis serta perawatan pasien Covid-19 di mana hal ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan kasus positif Covid-19 di kawasan ASEAN (ASEAN, 2020).

Analisis kedua adalah dari Uni Eropa (UE), di mana Uni Eropa menekankan pada pentingnya kerja sama yang berdasarkan integrasi dan harmonisasi kebijakan yang intensif. Uni Eropa melaksanakan diplomasi dalam bidang kesehatan dengan lebih menekankan pada diplomasi dan kerja sama kolektif kawasan dengan penegasan pada harmonisasi kebijakan serta integrasi kerja sama dengan mitra kawasan UE maupun organisasi internasional seperti WHO, ILO, WTO, dan UNDP. Kerja sama kawasan yang dilakukan UE secara jelas dapat terlihat ketika komisi Eropa mengadopsi paket kebijakan yang menekankan pada respons dari setiap negara anggota UE dengan bersandar pada kerangka kerja dan solusi yang bersifat komprehensif. Salah satunya adalah penerapan *European Roadmap for Covid-19 Rapid Risk Assessment* dengan berbagai langkah kerja seperti: Penguatan peran kesehatan publik sebagai aspek fundamental dari upaya yang bersifat non-medis dalam mengurangi laju penyebaran virus sampai vaksin ditemukan; harmonisasi kebijakan dan standar melakukan uji tes pada pasien Covid-19 dengan metode sesuai dengan regulasi dari WHO; pengawasan dan pengetesan berkala terhadap kelompok populasi yang lebih rentan terhadap Covid-19 seperti lansia maupun anak-anak dengan standar operasional yang ditetapkan WHO; kerangka kerja untuk metode pelacakan kontak terdekat dan pengawasan untuk melakukan pemetaan serta observasi kemajuan dari implementasi harmonisasi solusi dan respons kebijakan kesehatan dan sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19; Uni Eropa juga menekankan

akan pentingnya pertimbangan risiko yang ketat sebagai upaya untuk assessment terhadap regulasi dan standar penanganan Covid-19 yang terintegrasi dengan EC dan untuk mendukung upaya legislasi peraturan kesehatan oleh parlemen Eropa; implementasi sistem perlindungan sosial kawasan UE demi menjaga kondisi keuangan populasi UE; penetapan anggaran serta rekomendasi kebijakan untuk memberi stimulus pada perekonomian dan laju perdagangan yang kacau oleh Covid-19; dan adanya asesmen dari para pembuat kebijakan untuk tahap-tahap pelaksanaan kebijakan *social distancing* yang di mana menekankan pada harmonisasi ke seluruh negara anggota Uni Eropa (European Commission, 2020a).

Ketiga, berangkat dari kawasan, diplomasi kesehatan tentu harus dipandang dari aktor kunci yaitu Tiongkok, sebagai salah satu negara yang memiliki peran, penyebab, dan kontributor dalam analisa *global health diplomacy* memberi dampak bagi arah diplomasi global dalam bidang kesehatan. Sebelum Covid-19 menyerang, Tiongkok merupakan negara yang sedang disorot sebagai *new emerging economy power* di tengah berkecamuknya perang dagang antara AS dan Tiongkok yang menempatkan Tiongkok pada posisi yang dinamis pada arsitektur geopolitik Asia Pasifik – Afrika bahkan hingga ke Eropa melalui proyek BRI (*Belt Road Initiative*) yang dilakukan oleh Tiongkok. Bahkan hal ini membuat komisi Uni Eropa (*European Commission*) menyebut Tiongkok sebagai mitra kerja sama, kompetitor negara-negara Eropa, dan juga musuh yang secara sistemik sudah ada. Kemudian dengan Covid-19 menimpa dunia membawa Tiongkok ke dalam babak baru dalam diplomasi maupun arah kerja sama luar negerinya dalam bidang kesehatan terutama dengan UE. Hal ini dibuktikan pula ketika Tiongkok mengirimkan tenaga medisnya ke negara-negara Uni Eropa seperti Italia, Spanyol, dan negara lainnya untuk membantu penanganan Covid-19 setelah kurva kasus pandemi di daratan utama Tiongkok menurun. Hal ini dipahami sebagai salah satu bentuk bantuan yang diberikan Tiongkok di tengah krisis pandemi dalam bentuk *unprecedented level* yang, apabila dianalisis, melebihi valuasi kerja sama bantuan-bantuan ekonomi lainnya dalam tahun 2020 di tengah pandemi ini. Selain pengiriman tenaga medis, Tiongkok juga mengirimkan 50 ton bantuan perlengkapan medis yang dikirim melalui kementerian Tiongkok, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang beroperasi di Eropa, dan koneksi maupun jaringan diaspora Tiongkok di Eropa yang sebagian pengiriman bantuan juga dilakukan dengan nama program “*sister-city*”. Program ini didukung oleh bantuan dari jaringan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan bendera Tiongkok di Eropa dalam bentuk sumbangan CSR dan program bantuan ke negara-negara di Eropa barat. Tiongkok juga melakukan berbagai pertemuan konferensi dengan pihak-pihak pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait. Eropa belajar mengenai penanganan pandemi Covid-19 dengan Tiongkok sebagai narasumber dikarenakan pandemi tersebut berasal dari Wuhan (Seaman, 2020).

Jika dianalisis menggunakan unit level analisis *Global Health Diplomacy*, tentunya diplomasi kesehatan dan diplomasi publik yang dilakukan Tiongkok membawa pesan khusus yang ingin disebarkan kepada warga Eropa. Intervensi

Tiongkok pada diplomasi kesehatan dan publik yang dilakukan juga menunjukkan bahwasanya ada sebuah diskursus maupun perpecahan dalam internal para pemimpin negara-negara Uni Eropa itu sendiri dikarenakan integrasi serta harmonisasi kebijakan mereka dianggap kurang memuaskan akibat beberapa negara Eropa mengizinkan bantuan dari Tiongkok dan memberikan ruang untuk Tiongkok menanam agendanya di Eropa. Efek berikutnya yang mungkin terjadi adalah di mana Uni Eropa mengalami disintegrasi dalam mencapai jalan tengah dalam melakukan manajemen hubungan dan diplomasi dengan Beijing. Apalagi saat ini tengah bertumbuh populisme sayap kanan di Eropa yang cenderung mengakomodasi *xenophobia* maupun diskriminasi yang dilakukan oleh beberapa lapisan masyarakat Eropa terhadap keturunan *chinese-european* ataupun komunitas keturunan langsung Tionghoa yang tinggal di Eropa. Menurut Higgot (2018), adanya gelombang sayap kanan di Eropa juga membuat kebijakan luar negeri negara-negara Eropa dan altruisme Uni Eropa terdampak. Pasca pandemi, diplomasi kesehatan tentu akan masih dilakukan, tetapi dengan menyesuaikan kondisi di mana negara-negara dunia sudah mulai beranjak ke fase adaptasi dengan *new normal*. Kebijakan luar negeri aktor negara pasti akan menyesuaikan dengan keadaan dari normal baru itu sendiri. Oleh karena itu, sikap yang paling tepat adalah dengan melakukan diplomasi serta interaksi antara aktor negara dengan berdasar pada komitmen serta norma yang dianut dan dipahami secara bersama.

Disrupsi dan Perubahan Tataan Ekonomi Global: Pandemi, dan Pasca Pandemi

Pandemi Covid-19 membawa perubahan yang begitu besar dalam tataan ekonomi global dengan ditunjukkan pada tren penurunan yang cukup progresif, baik dalam bidang makro ekonomi maupun bidang mikro ekonomi global. Berbagai negara merespons perubahan-perubahan ini dengan implementasi kebijakan yang diambil secara cepat untuk membendung efek negatif dari pelemahan ekonomi dan di tengah kondisi tidak adanya obat maupun vaksin yang dapat melawan virus Covid-19. Permasalahan ekonomi di berbagai kawasan memberikan dampak dalam skala yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan yang meningkat tajam seperti yang diprediksi oleh Bank Dunia dari 8,1% pada 2019 menjadi 8,6% pada tahun 2020 yang diartikan akan ada lebih dari 50 juta orang yang akan mengalami kemiskinan akibat pandemi Covid-19 yang di mana negara sendiri tentunya akan berjuang untuk menghadapi *economic fallout* yang juga membuat berbagai investasi dan valuasi perdagangan yang menurun hingga menyentuh 32% dan berdampak pada negara maju maupun negara berkembang (Butler, 2020). Hal ini diiringi dengan masalah-masalah keamanan sosial seperti krisis politik, di mana tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun drastis. Angka kriminalitas meningkat dengan bertambahnya jumlah pengangguran di suatu negara, ditambah dengan sulitnya penegakan hukum terutama di negara-negara yang dikuasai mafia. Tidak adanya ketegasan hukum oleh polisi dan perangkat pemerintahan, serta masalah-masalah yang menimpa negara-negara konflik dan *failed states*

yang diperparah dengan ketidakhadiran pemerintahan pusat yang kuat serta tidak adanya *rule of law* (Mahler, 2020).

Sebelum Covid-19 muncul sebagai pandemi global, berbagai fenomena terjadi dalam dinamika ekonomi global, seperti AS yang berusaha untuk mencabut beberapa negara dari status negara berkembang menuju negara maju yang dinilai tidak adil karena memanfaatkan status mereka sebagai negara berkembang yang lebih memiliki kesempatan untuk dikenakan tarif perdagangan yang lebih rendah. Proteksionisme ekonomi yang dilakukan oleh presiden AS, Trump membuat berbagai negara bernegosiasi dan menolak keputusan dari daftar negara maju terbaru yang diakui pemerintah (Pinto, 2018). Ditambah lagi dengan fenomena meledaknya nasionalisme ekonomi dan populisme sayap kanan di Eropa yang membuat politik dan ekonomi kanan berkembang pesat dan menjamur di Eropa menyebabkan suatu fenomena yang dinamakan *trilemma economy* pada Uni Eropa (Kyle & Gultchin, 2018). Fenomena trilemma ini sendiri dapat dikatakan relevan dengan apa yang terjadi pada krisis ekonomi global pada 2008 dan Covid-19 sebagai salah satu krisis global yang memberikan dampak yang luar biasa. Pandemi dapat dikatakan juga memancing dan me-*recall* akan populisme yang relevan dengan apa yang sedang terjadi di Eropa sekarang, di mana pemimpin sayap kanan yang mayoritas memegang kekuasaan di Eropa dengan didukung oleh partai-partai terkait (Eiermann et al, 2017). Mereka cenderung protektif, konservatif, dan *concern* dengan kebijakan mengenai perbatasan dan imigrasi. Secara historis, populisme sayap kanan dalam tatanan ekonomi global yang memanfaatkan isu-isu dan krisis moneter global pada 2008 untuk menekankan kembali kapitalisme dan menata kembali arsitektur perekonomian global.

Kejadian berkembangnya infiltrasi sel-sel terorisme yang berhasil masuk menggunakan jalur pengungsian dari timur tengah ke Eropa telah membuat berbagai pemimpin konservatif di berhaluan kanan untuk menutup perbatasan dengan dua alasan fundamental yaitu: Untuk mencegah persebaran virus dan untuk mencegah orang yang tidak mereka inginkan untuk masuk kedalam negara mereka, baik pengungsi, *stateless people*, maupun ras tertentu yang juga menghadapi diskriminasi. Ras yang dimaksud adalah orang eropa keturunan Asia terutama berdarah Tionghoa ataupun orang Asia Timur dikarenakan xenophobia serta *prejudices* yang ada terhadap stigmatisasi dikarenakan secara kausalitas Covid-19 berasal dari Tiongkok. Hal ini membawa masalah dalam dimensi lain yang akan sama-sama menimbulkan *shifting* bagi para aktor ketika mempertimbangkan sesuatu. Krisis pandemi Covid-19 juga membuat masyarakat lebih pesimistik dalam membuka negara mereka untuk menerima migran dan kasus xenophobia meningkat. Kemudian hal ini juga digunakan sebagai sebuah *notion* dari para pemimpin inggris untuk menegaskan pentingnya fenomena keluarnya Inggris dari Uni Eropa untuk dipahami dalam kacamata studi regionalisme dan tatanan ekonomi global.

Dapat dipahami bahwasanya dengan munculnya pandemi Covid-19 maka sudah dipastikan bahwa Covid-19 dapat mempengaruhi tatanan ekonomi global

yang terbentuk dengan munculnya ancaman terhadap liberalisasi ekonomi dan harmonisasi kebijakan dalam penanganan pandemi. Ancaman tersebut bernama populisme (Learner, 2018). Terjadinya populisme dalam proses demokrasi antara kepala pemerintahan Inggris yang menekankan pentingnya brexit demi menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan Inggris menjadi retorika utama dalam fenomena populisme ini. Bukti lain dari fenomena populisme sayap kanan di Eropa seperti arus migran yang dapat mengancam kondisi sosial ekonomi lokal. Hal inilah yang terjadi pada Inggris saat Brexit, di mana Inggris merasa UE tidak berdampak karena kebijakan UE untuk integrasi ekonomi regional malah menjadikan disintegrasi ekonomi nasional Inggris (Camus & Lebourg, 2017). Salah satu kebijakan Uni Eropa yang paling kontroversial yaitu kebijakan pembukaan perbatasan (*European Union Open Border Policy*) dijadikan sebagai salah satu alasan banyaknya kasus Xenophobia dan imigran diserang baik melalui populisme politik sayap kanan yang dijadikan bahan kampanye. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Akkerman (2003) tentang adanya suatu fenomena populisme sayap kanan dalam sejarah yang di mana para pemimpin negara yang membawa nilai bahwasanya mereka berjuang demi nurani hati rakyat (*will of people*) dan melawan suatu kaum yang dinamakan elit. Hal ini sangatlah relevan dengan nasionalisme dan proteksionisme ekonomi, di mana terjadi akibat reaksi dari liberalisasi ekonomi (Mudde & Kaltwasser, 2017). Populisme ini sendiri selaras dengan adanya suatu fenomena yang akan menjadi suatu “komplementer” dari populisme kanan ini sendiri yang lama kelamaan membawa negara dalam kondisi yang disebut dengan “nasionalisme dalam ekonomi politik internasional”. Nasionalisme dalam tatanan ekonomi global itu memiliki definisi sebagai penjelasan bahwa perekonomian global di tengah globalisasi menempatkan negara dalam posisi di suatu tatanan ekonomi global tempat penetrasi ekonomi yang masif dan lancar. Kedaulatan ekonomi dalam negeri serta kedaulatan kontrol pemerintah suatu aktor negara terhadap perekonomiannya mulai terancam hingga dapat menimbulkan tantangan-tantangan yang berpengaruh terhadap situasi ekonomi dan politik domestik (Alwi S. , 1999). Hal ini sekilas terlihat seperti Chauvinisme namun artikel ini akan lebih melihat bahwasanya kehadiran krisis yang disebabkan oleh bencana alam, pandemi, maupun konflik sudah pasti menjadi ancaman bagi liberalisasi ekonomi yang berusaha dipertahankan setiap negara.

Dilema berikutnya adalah proteksionisme – yang menjadi tantangan utama liberalisasi kerja sama pasca adanya Covid-19. Kerja sama tersebut nantinya tidak akan bersifat untuk mencapai keuntungan absolut, namun akan cenderung relatif dalam menjaga *confidence-building* oleh para aktor di suatu kawasan. Tidak terbatas pada demikian hal itu juga dilakukan pada organisasi multilateral dalam tatanan ekonomi global tentu kerja sama yang dilakukan tidak lagi murni dikarenakan semangat multilateralisme dan *shared values* namun akan lebih cenderung untuk memastikan agar negara mereka terlindungi. Dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan tantangan pada aktor-aktor negara yang terlibat dalam sistem internasional bahwasanya nilai-nilai serta konsep kerja sama dan institusionalisasi yang menjelaskan perilaku aktor sistem

internasional dapat berubah ketika pandemi Covid-19 sebagai krisis mengulangi anomali. Pola yang sama nantinya akan berakhir pada *shifting* dalam sistem internasional dan liberalisasi serta integrasi ekonomi dalam suatu komunitas dalam sistem internasional diambang kegagalan dikarenakan krisis Covid-19.

Argumen di atas menunjukkan bahawa ada kemiripan dan kesamaan asumsi baik secara kausalitas maupun secara teoritik pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap tatanan ekonomi global. Persamaan pertama adalah isu permasalahan mengenai migrasi dan perbatasan sama-sama dijadikan sebagai salah satu variabel untuk diperdebatkan. Isu ini dibawa oleh pemimpin yang berorientasi politik kanan yang sangat konservatif dan cenderung menentang liberalisasi ekonomi serta mendukung nasionalisme ekonomi, proteksionisme ekonomi, dan menggunakan populisme, yang di mana dalam hal ini elit yang dimaksud adalah Tiongkok itu sendiri, sebagai “musuh sistemik, mitra kerja sama, dan salah satu aktor kunci” dari pandemi Covid-19. Kemudian, dengan maraknya persebaran Covid-19 maka integrasi ekonomi dan harmonisasi kebijakan di Uni Eropa terancam dikarenakan aktor negara anggota kawasan, anggota Uni Eropa, harus mengutamakan untuk bangkit dan melakukan *recovery* dari pandemi Covid-19. Untuk menyimpulkan, nilai-nilai liberalisme dalam rezim dan institusi internasional yang relevan menjelaskan perilaku para aktor akan berubah dan mengancam liberalisme secara nyata yang telah dituangkan pada instrumen rezim kawasan yang telah disepakati berpuluh-puluh tahun silam.

Berangkat ke sisi holistik dari tatanan ekonomi global, populasi masyarakat global sebagai aktor dasar fundamental tentu perlu dibahas. Dalam hal ini, pandemi Covid-19 yang telah merusak tatanan ekonomi global dan memaksa pemerintahan meminimalisir dampak yang ada. Seperti contoh, daya beli masyarakat menjadi lesu dan investasi asing ditarik sehingga korporasi dan berbagai bisnis harus kehilangan perputaran uang serta modal yang digunakan untuk menjaga kesinambungan bisnis. Negara sebagai aktor utama pembuat kebijakan di level multilateral dalam tatanan ekonomi global tentu melakukan berbagai tindakan preventif seperti mengajukan penyesuaian peraturan perdagangan kepada WTO di tengah berbagai fakta mengejutkan yang membawa para aktor negara kepada pertimbangan pesimistik. Tentunya berbagai negara selama pandemi akan fokus pada bagaimana melakukan remedial dan manajemen risiko dari kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan dalam bidang ekonomi baik selama maupun pasca pandemi.

Tata kelola ekonomi global menjadi salah satu hal penting ketika dibicarakan dalam perspektif hubungan internasional untuk memahami situasi global selama Covid-19. Sebelum pandemi, kerja sama dan tatanan ekonomi global berfokus pada isu-isu tematik seperti pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, penguatan peran usaha-usaha menengah bawah (*small medium enterprises/ SMEs*), dan kerja sama kawasan dalam hal harmonisasi respons darurat dalam penyesuaian kebijakan di tengah krisis. Contohnya adalah ketika Uni Eropa mengadopsi berbagai usaha dan komitmen untuk memberi arah

pembuatan kebijakan untuk diintegrasikan secara kolektif dan diadopsi ke dalam program nasional negara-negara anggota eropa dengan liberalisasi ekonomi serta pengaturan agar setiap negara anggota di Uni Eropa dapat memiliki peran yang kuat seperti dengan implementasi berbagai solusi berikut ini dalam tatanan ekonomi kawasan Uni Eropa. Kawasan Uni Eropa sendiri melakukan harmonisasi dan liberalisasi ekonomi baik dalam perdagangan barang, layanan, maupun kekayaan intelektual (IP).

Salah satu kebijakan ekonomi yang cukup berpengaruh diimplementasikan oleh kawasan Uni Eropa adalah ketika parlemen Eropa memutuskan untuk mengadopsi kebijakan pemberian stimulus pada aktor-aktor pasar untuk menjaga kesinambungan pasar sebagai sarana transaksi yang menjaga perputaran uang. Di pasar Uni Eropa, di mana UE sepakat untuk mengadopsi anggaran sebesar 640 miliar Euro untuk menjadi dana penggerak dan membantu kelanjutan liberalisasi ekonomi dan penyatuan kembali ekonomi serta harmonisasi kebijakan moneter dalam suatu pasar tunggal Uni Eropa. Diharap ini dapat menjadi suntikan dana segar di tengah krisis untuk negara anggota Uni Eropa dalam mempertimbangkan gaji dan upah buruh maupun angkatan kerja untuk mencegah pengangguran dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah Covid-19 yang menghantam berbagai sektor makro ekonomi maupun mikro ekonomi (KPMG, 2020).

Berbagai mekanisme lain yang dilakukan adalah di mana Uni Eropa melalui komisi Eropa mengimplementasikan kebijakan Covid-19 sebagai berikut untuk mendukung arah dan visi jangka panjang kawasan yang terintegrasi dan terliberalisasi: Menegaskan bahwa penekanan pentingnya intensitas komunikasi antar anggota kawasan yang dilakukan dengan menggunakan prinsip regionalisme maupun multilateralisme sebagai penyelesaian dari permasalahan intra-regional dari Uni Eropa tentang pandemi Covid-19 baik dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan; melaksanakan “*team-europe approach*” sebagai arah pendekatan kepada anggota negara yang ada di dalam kawasan Uni Eropa yang menekankan pada integrasi setiap institusi dan badan dalam Uni Eropa untuk mendukung kondisi domestik negara dengan memaksimalkan baik secara struktural maupun fungsional setiap organ yang terafiliasi dengan Uni Eropa seperti bank kawasan eropa yaitu contohnya *European Investment Bank (EIB)* dan *European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)*. Uni Eropa merencanakan suatu rencana kerja sama bantuan finansial dalam jumlah yang besar dan tersebar rata sebagai wujud pemberdayaan terhadap kontribusi dan komitmen anggotanya; kemudian melakukan penekanan bahwasanya Uni Eropa berkomitmen untuk lebih transparan mengenai fakta dan data budget maupun implementasi kebijakan untuk menghindari misinformasi serta miskomunikasi antar *stakeholder* dan juga memperkuat jalur komunikasi UE dengan WHO untuk implementasi WHO *Preparedness Framework* yang lebih inklusif dan responsif; Uni Eropa juga berusaha untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran kebijakan mereka dengan improvisasi pola pengelolaan risiko dan program bantuan yang mendukung penelitian serta bantuan dana untuk para negara anggota Uni Eropa dalam pencarian dan penelitian vaksin Covid-19. Hal ini dilakukan dengan mekanisme

yang transparan dan *tangible*; dan yang terakhir Uni Eropa juga bekerja sama dengan mitra organisasi internasional lain seperti organisasi buruh internasional (ILO) untuk memastikan eksekusi rencana kebijakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat berjalan dengan transparan, akuntabel, dan seluruh *workforce* di Uni Eropa dapat memperoleh kesempatan dan hidup dengan kualitas baik di tengah pandemi dengan adanya suatu skema *relief* measure untuk meringankan beban ekonomi dan sosial selama pandemi dan juga didukung oleh adanya perlindungan sosial yang diharmonisasikan dengan struktur dan fungsi yang ada dibawah naungan Uni Eropa (European Commission, 2020b).

Pasca Pandemi Covid-19 dan Tatanan Global

Setelah Covid-19 berakhir, dipastikan setiap negara akan berusaha untuk menghadapi suatu tantangan baru di mana para rezim internasional akan berusaha untuk menjadi lebih relevan lagi dengan agenda-agenda pembahasan ekonomi pada tingkat multilateral akan lebih mengedepankan bagaimana rezim internasional harus kembali berfokus lebih lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dinilai sebagai isu-isu keamanan manusia (*human security agenda*) dan ekonomi. Isu tersebut lebih melibatkan aktor non-negara karena dari pandemi ini dunia telah belajar bahwa aktor negara hanya bisa melakukan *policy making* dan pengarahan kepada para pelaku bisnis dalam berbagai sektor di suatu negara namun akan cenderung memiliki peran yang lebih normatif. Sistem internasional juga akan beradaptasi dengan adanya kondisi interdependensi antar negara yang lebih kompleks daripada sebelumnya dikarenakan oleh tidak ada hierarki yang begitu jelas dan *tangible* untuk dilaksanakan dalam tatanan global sehingga setiap isu tentu akan dipertimbangkan sama pentingnya dikarenakan belajar dari Covid-19 yang memberikan dampak multidimensional yang begitu kompleks dan memerlukan kerja sama kolektif dan liberalisasi serta harmonisasi kebijakan namun terancam dengan adanya pertumbuhan dari populisme sayap kanan yang semakin menjamur tidak hanya di Amerika dan Eropa, kemungkinan juga akan sampai ke Asia apalagi isu-isu seperti Hong Kong, Kashmir, dan Yemen menjadi bukti bahwasanya Non-State Actor mulai memegang peranan dalam rantai sistem internasional. Namun dalam bidang perekonomian tentu negara tidak menjadi aktor tunggal dalam permainan sentral dalam panggung ekonomi internasional.

Hal ini juga didukung oleh bukti bahwasanya globalisasi dan kemajuan teknologi senantiasa mewarnai dinamika yang ada di dalam sistem internasional. Oleh karena itu, hal ini juga menempatkan negara menjadi aktor yang mengatur sektor privat dan sebagian besar dari kegiatan akan dilaksanakan oleh sektor privat yang mulai dilibatkan dan mulai bertumbuh kembang seiring perkembangan teknologi, menjamurnya SMEs, dan urbanisasi masyarakat. Dunia dalam kacamata hubungan internasional akan melihat bahwasanya negara tidak lagi akan bekerja sama dalam liberalisme sepenuhnya dengan semangat multilateralisme. Namun liberalisme sendiri akan menjadi dasar bahwasanya masih relevan. Negara akan cenderung berlomba-lomba sehingga kerja sama yang dilakukan berorientasi pada keuntungan absolut, tetapi tidak dengan interdependensi penuh seperti sebelumnya. Hal ini membuat rantai perekonomian

global kemungkinan akan tetap bersandar pada liberalisme meskipun lebih ke post-liberal dengan trend politik yang semakin pasti bahwasanya populisme akan memegang peran penting dalam membentuk tatanan ekonomi global pasca pandemi.

Organisasi perdagangan dunia dalam era *post-bretton woods* akan mengambil pandemi ini sebagai pelajaran bahwasanya hiperglobalisasilah yang menjadikan pandemi ini meluas dan lebih kuat dari biasanya. Organisasi internasional belum tentu dapat diandalkan untuk sepenuhnya membiayai maupun memberikan bantuan stimulus dikarenakan nantinya aktor domestik itu yang akan bermain dalam pembuatan kebijakan. Organisasi internasional mungkin akan lebih menjadi sebuah fasilitator dalam memberikan saran, rekomendasi, analisis, dan peringatan serta bantuan teknis. Hal ini dapat dikatakan kemungkinan akan terjadi dikarenakan liberalisasi ekonomi yang terancam oleh populisme dan integrasi mungkin akan membuat negara berpikir dua kali ketika akan menyetujui rencana integrasi ke suatu komunitas kawasan. Organisasi internasional seperti WTO tetap relevan dengan perannya untuk membantu mediasi dan diplomasi konflik yang ada dalam tatanan ekonomi global melalui *dispute-settlement* yang dimiliki oleh WTO sebagai mekanisme yang ada.

Perdamaian Dunia (*Human Security Agenda*): Perspektif selama Pandemi dan Pasca Pandemi

Resolusi konflik dan perdamaian dunia menjadi salah satu isu *high political* yang layak diperdebatkan dikarenakan Covid-19 telah mempengaruhi peta politik baik secara geopolitik, diplomasi, maupun resolusi konflik yang dibahas dalam tingkat multilateral, dalam hal ini PBB dan peranan kawasan dalam resolusi konflik tertentu. Virus SARS-COV-2 berpotensi untuk menjadi ancaman senjata biologis sudah mulai diperdebatkan Beberapa aktor negara mengkhawatirkan penggunaan virus ini sebagai senjata dalam konflik yang berlangsung, baik di timur tengah, Afrika, bahkan Eropa melalui aktivitas terorisme. Meskipun isu Covid-19 sebagai senjata biologis belum secara resmi dan *tangible* dibahas oleh DK PBB mengenai regulasi ataupun stipulasi di dalam suatu resolusi yang mengikat secara hukum, kekhawatiran sudah mulai tampak. Pentingnya mengutamakan piagam PBB dalam mempertahankan perdamaian, keamanan internasional, dan menjaga agar kerja sama berdasarkan kepercayaan yang strategik dapat dilakukan di antara para aktor di tengah pandemi Covid-19.

Namun, dalam hal geopolitik kita ambil contoh adalah dari permainan Tiongkok versus AS di lanskap politik Eropa. AS kalah cepat dengan Tiongkok dalam hal untuk melakukan kerja sama dikarenakan dalam Covid-19 di Eropa, Tiongkok sendiri sudah lebih dulu mempertontonkan usulan kemitraannya dengan beberapa negara di Eropa. Contohnya adalah negara-negara UE yang lebih fleksibel dalam perjanjian dagang dengan Tiongkok di tengah perang dagang dengan AS yang dipimpin Trump kala itu. Adapun UE menjadi pelanggan investasi dan kerja sama dagang lanjutan Tiongkok di tengah pandemi pada sektor energi, konstruksi, telekomunikasi, dan perhubungan udara (BBC, 2020). Selain

itu Apuzzo (2020) juga menyatakan bahwa Tiongkok menerima perlakuan yang lebih lembut dari Uni Eropa karena tekanan politik ekonomi yang ada melalui suatu dokumen resmi dari laporan Uni Eropa yang ditulis ulang tanpa mengkonfrontasikan Tiongkok, berbeda dengan dokumen versi sebelumnya yang lebih asertif saat ditekan oleh Trump.

Keamanan manusia menurut UNDP menjadi suatu gagasan keamanan penting yang harus diprioritaskan ketimbang agenda keamanan tradisional yang melibatkan kedaulatan dan permasalahan antar negara sebagai kontekstualisasi konflik spektrum tradisional (UNDP, 1994). Selama pandemi Covid-19, perkembangan keamanan internasional kontemporer di mana agenda keamanan manusia menjadi fokus kebijakan negara untuk memastikan keamanan akan rakyat sebagai manusia agar tidak menjadi korban dari ancaman fisik maupun *intangible threats* (ancaman tidak terlihat). Negara harus menaruh perhatian khusus untuk melindungi kebebasan vital manusia dari ancaman yang wajib dilindungi (Buzan, Waever, & Wilde, 1998). Keamanan manusia ini operasionalisasinya secara historis dimulai pada situasi pasca perang dingin (Clausewitz, 1984). Pada masa itu konsep moral dan keamanan dengan konsep demiliterisasi muncul, kemudian pasca 1994 di mana *human security* menjadi konsep utama yang dibawa oleh UNDP dan isu keamanan pembangunan mulai dikembangkan. Kemudian, pada saat ini di mana tantangan multidimensi dari berbagai sektor harus diselesaikan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan manusia.

Konsep keamanan manusia menjadi isu penting dalam HI untuk diperhatikan karena isu-isu yang mengancam kesejahteraan dan keamanan menjadi isu penting untuk dipelajari dikarenakan berkembangnya liberalisme pada era pasca perang dingin dan interdependensi yang terjadi di belahan dunia. Berbagai kerja sama yang didirikan PBB membuat isu tradisional seperti perang jarang terjadi bukanlah isu kontemporer karena sekarang isu kejahatan transnasional yang dilakukan oleh aktor non-negara menjadi lebih sering ketimbang konflik militer (Bobic, 2014). Sehingga dalam hal ini agar studi HI lebih empiris maka layak untuk mempelajari isu keamanan manusia. Dikarenakan sekarang HI di forum multilateral, bilateral dan regional pun lebih *state-centric*. Saat ini negara memiliki tendensi untuk tidak berkonfrontasi langsung, dan menggunakan pihak ketiga (*proxy*) dalam manifestasi kepentingan mereka. Ancaman yang dilakukan cenderung berkarakter erat dengan isu keamanan manusia seperti pangan (*food security*) dan kesehatan (*health security*). Dengan demikian isu keamanan manusia akan membawa perubahan struktural dan sistemik untuk diplomasi demi terciptanya hubungan internasional yang *human-centered*. Dengan demikian redefinisi hubungan internasional telah mempengaruhi paradigma tatanan politik ekonomi internasional yang telah ada dari era tradisional.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan multidimensional dalam hubungan internasional, terutama pada tatanan politik ekonomi dan pembangunan internasional. Perubahan-perubahan tersebut membuat para negara dituntut untuk lebih resilien dan menetapkan usaha untuk mengatasi isu transnasional yang berdampak langsung terhadap manusia (rakyat) dan tidak melulu pada negara. Polarisasi global dan munculnya populisme serta proteksionisme mengancam universalisme nilai altruisme global. Diplomasi multilateral saat ini cenderung diwarnai oleh kepentingan regional, di mana *norm-setting* akan lebih berorientasi pada isu pembangunan non-tradisional dalam sekuritisasi manusia. Tatanan ekonomi pasca Bretton Woods membuat integrasi ekonomi kawasan dan eksplorasi usaha-usaha politik ekonomi yang dilakukan harus mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda tersebut berfungsi untuk menjaga kesinambungan dunia yang tidak lagi *state-centric* dan lanskap politik internasional masih terus akan tertantang dengan *hot peace* saat ini antara AS dan Tiongkok. Munculnya aktor baru sebagai *major power* akan membuat agenda pembangunan menjadi *carrot or stick* yang baru ketimbang keamanan militeristik. Hubungan internasional sudah berubah dan tidak lagi *state centric* namun telah mencapai era di mana manusia menjadi fokus dari diplomasi internasional yang dilakukan oleh para aktor terhadap berbagai isu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkerman, A. (2003). Populism and Democracy: Challenge or Pathology? *Acta Politica* Vol. 38, 147-159.
- Alwi, S. (1999). Nasionalisme Ekonomi Indonesia Dalam Era Kompetisi Global. *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(1), 59-69.
- Apuzzo, M. (2020, April 24). *Pressured by China, E.U. Softens Report on Covid-19 Disinformation*. Dikutip dari New York Times: <https://www.nytimes.com/2020/04/24/world/europe/disinformation-china-eu-coronavirus.html>
- ASEAN. (2020). *Joint Statement Special Video Conference of ASEAN Plus Three Health Ministers in Enhancing Cooperation on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Response*. ASEAN. Dikutip Juni 26, 2020, dari <https://asean.org/joint-statement-special-video-conference-asean-plus-three-health-ministers-enhancing-cooperation-coronavirus-disease-2019-covid-19-responsse/>
- Badie, B., Berg-Schlosser, D., & Morlino, L. (2011). *International Encyclopedia of Political Science*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- BBC. (2020, Desember 29). *China and EU 'on verge' of major investment deal*. Dikutip April 19, 2021, dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/business-55464564>
- Bobic, M. (2014). Transnational Organised Crime and Terrorism: Nexus Needing a Human Security Framework. *Global Crime*, 15(3-4), 241-258. doi:10.1080/17440572.2014.927327

- Breslin, S., & Higgot, R. (2000). 'Studying Regions: Learning dari the Old, Constructing the New. *New Political Economy*, 5(3), 333-352.
- Busby, J. (2020). *What International Relations Tells Us About Covid-19*. Dikutip Juni 26, 2020, dari E- International Website: <https://www.e-ir.info/pdf/83161>
- Butler, C. (2020, March 4). How to Fight the Economic Fallout dari Coronavirus. Chatam House. Dikutip Juni 26, 2020, dari https://www.chathamhouse.org/expert/comment/how-fight-economic-fallout-coronavirus?gclid=CjwKCAjwnIr1BRAWEiwA6GpwNW5oL09ArST25i_y90TSIEGGv05ZSyEz_xbGUdgHVKwdlHmgLhi8txoCbKUQAvD_BwE
- Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Publisher.
- Camus, J.-Y., & Lebourg, N. (2017). *Far-Right Politics in Europe*. Harvard University Press.
- Clausewitz, C. V., Howard, M., Paret, P., & Brodie, B. (1984). *On War* (15 ed.). Princeton: Princeton University Press.
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6.
- Eiermann, M., Mounk, Y., & Gultchin, L. (2017). *European Populism: Trends, Threats and Future Prospects*. London: Tony Blair Institute For Global Change.
- European Commission. (2020a). Dikutip Juni 26, 2020, dari European Union Global Response to Covid-19: https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-responsse-covid-19_en
- European Commission. (2020b). *Coronavirus: European Solidarity in action*. European Union.
- Frieden, J. (2012). Global Economic Governance After the Crisis. *Perspektiven der Wirtschaftspolitik*(13).
- Gallagher, K. P. (2012). Regaining Control? Capital Controls and the Global Financial Crisis. *The Consequences of the Global Financial Crisis: The Rethoric of Reform and Regulation*. (W. Grant, & G. K. Wilson, Eds.) Oxford: Oxford University Press.
- Gavin, B., & Langenhove, L. V. (2003). Trade in a World of Regions. In G. P. Sampson, & S. Woolcock (Eds.), *Regionalism, Multilateralism, and Economic Integration: The Recent Experience* (pp. 278-280). Tokyo: United Nations University Press.
- Harris, C. (n.d.). Coronavirus statistics: Latest numbers on Covid-19 cases and deaths. Dikutip Juni 26, 2020, dari <https://www.euronews.com/2020/06/26/covid-19-coronavirus-breakdown-of-deaths-and-infections-worldwide>
- Higgot, R. (2012). The Theory and Practice of Global Economic Governance in the Early 21st Century: The Limits of Multilateralism. *The Global*

- Financial Crisis: The Rhetoric Reform and Regulation*. (W. Grant, & G. K. Wilson, Eds.) Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
- Higgott, R. (2018). Globalism, Populism and the Limits of Global Economic Governance. *Journal of Inter-Regional Studies: Regional and Global Perspectives (JIRS)* — Vol.1, 2-23.
- Jahn, B. (2018). Liberal Internationalism: Historical Trajectory and Current Prospects. *International Affairs*, 94(1).
- Kant, I. (1795). *Perpetual Peace: A Philosophical Essay*. London: S. Sonnenschein.
- Katz, R. e. (2011, September). Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization. *Milbank Quarterly*, 89.
- Kickbush, I., & Erk, C. (2009). Global Health Diplomacy. In A. Clapham, & M. Robinson, *Realizing the Right to Health* (pp. 517-524). Zurich: Ruffer and Ruby.
- KPMG. (2020). *European Union Government and institution measures in response to COVID-19*. Dikutip Juni 26, 2020, dari <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-union-government-and-institu>
- Kyle, J., & Gultchin, L. (2018). *Populist in Power Around the World*. London: Tony Blair Institute For Global Change.
- Learner, H. (2019, April). *The Economic Impact of Populism*. Dikutip Mei 27, 2020, dari Savills: <https://www.savills.com/impacts/market-trends/the-economic-impact-of-populism.html>
- Locke, J. (1988). *Two Treaties of the Government (TTG)*. (P. Laslett, Ed.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahler, D. G. (2020, April 20). The Impact of Covid-19 on Global Poverty: Why Sub-Saharan Africa might be the region hardest hit. World Bank Blogs. Dikutip Juni 26, 2020, dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-COVID-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest>
- Meiser, J. W. (2018). Introducing Liberalism in International Relations Theory. *International Relations Theory*.
- Moravcsik, A. (1992). *Liberalism and International Relations Theory*. <as, Cambridge, Massachusetts: Center For International Affairs, Harvard University.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- OECD. (2020, March). OECD Economic Outlook Interim Report. Paris: OECD Publishing.
- Pinto, J. (2018). Trump, a Nationalist and a Populist Leader. *Global Journal of Human-Social Science Research*.
- Seaman, J. (2020). China as Partner, Competitor, and Rival Amid Covid-19. In E. T. China, & J. Seaman (Ed.), *Covid-19 and Europe-China Relations* (pp. 5-8). European Think Tank Network on China.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: Oxford University Press.

- Volodzko, D. (2016, April 12). *China's Medical Diplomacy*. Dikutip Juni 26, 2020, dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/04/chinas-medical-diplomacy/>
- WHO. (2020). *COVID-19 Strategic Preparedness And Response Plan*. World Health Organization. Dikutip Juni 26, 2020